

Hadi Sasana

Abstract

In the fiscal decentralization era, local governments is provided with authority to increase their income and to conduct allocative function in setting priority of local development. This research is intended to examine the influence of fiscal decentralization on economic growth, at regencies/municipalities level in Central Java Province.

Research population consist of 29 regencies and 6 municipalities, employing secondary data from Central Bureau of Statistic of Central Java Province and regencies/municipalities level in Central Java Province within the period of 2001 up to 2005. Data analysis is conducted by using path analysis with SPSS program software.

The results of this study indicate that, fiscal decentralization has a positive and significant effect on economic growth at regencies/municipalities level in Central Java Province.

Keywords: fiscal decentralization, economic growth.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang direvisi dengan Undang-Undang No. 32 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004, sudah dilakukan sejak tanggal 1 Januari 2001. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan.

Pembangunan di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, untuk itu pembangunan di daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan secara bertahap sehingga mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan memberikan manfaat yang optimal jika diikuti oleh kemampuan finansial yang memadai oleh daerah otonom. Sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah : Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi *vertical (center region)* dan *horizontal (region-region)* imbalances antar daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat

dan daerah merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Fisher dalam Kuncoro (2004), transfer antar pemerintah merupakan fenomena umum yang terjadi di semua negara di dunia terlepas dari sistem pemerintahannya, dan bahkan sudah menjadi ciri yang paling menonjol dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Di Indonesia transfer dari pemerintah pusat ke daerah meliputi : dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Besarnya transfer pemerintah pusat ke kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah, seluruhnya selalu mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut juga terjadi pada pengeluaran total daerah di kota/kabupaten Provinsi Jawa Tengah (lihat lampiran). Peningkatan transfer yang diikuti oleh peningkatan pengeluaran total, menunjukkan bahwa total pengeluaran pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh besarnya transfer dari pemerintah pusat.

Dampak pengeluaran pemerintah terhadap kondisi makro ekonomi di kabupaten/kota di Jawa Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dilihat dari hasil *output* pembangunan daerah yang tercermin pertumbuhan ekonomi riil (lihat lampiran 1), menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB riil di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama tiga tahun terakhir cenderung meningkat. Tetapi apabila dilihat per daerah, menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sangat bervariasi. Pada tahun 2003 daerah yang paling tinggi pertumbuhan ekonominya adalah Kabupaten Cilacap (tumbuh sebesar 6,56 persen), sedangkan daerah yang paling rendah tingkat pertumbuhannya adalah Kabupaten Semarang (-2,96 persen). Pada tingkat Provinsi Jawa Tengah perekonomian tahun 2003 tumbuh sebesar 4,98 persen. Pada tahun 2005 semua daerah mengalami pertumbuhan positif, daerah yang paling tinggi pertumbuhan ekonominya adalah Kabupaten Cilacap yaitu sebesar 7,99 persen, sedangkan daerah paling rendah pertumbuhan ekonominya adalah Kabupaten Kendal dengan pertumbuhan sebesar 2,69 persen. Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2005 perekonomiannya tumbuh sebesar 5,35 persen (BPS, Jawa Tengah Dalam Angka, 2006). Hampir semua daerah di Jawa Tengah perekonomian cenderung meningkat, tetapi pertumbuhan tersebut belum mampu menyerap jumlah pengangguran yang cukup besar di wilayah ini, sehingga diperlukan laju pertumbuhan yang lebih besar lagi untuk mendorong kinerja ekonomi makro daerah.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahannya adalah bahwa selama pelaksanaan desentralisasi fiskal di kabupaten/kota di Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi daerah sangat bervariasi dan relatif rendah.

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam penentuan perencanaan dan kebijakan pembangunan sehingga pembangunan dalam era desentralisasi fiskal dapat mencapai hasil yang optimal dan mewujudkan pemerataan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Landasan Teoritik dan Penelitian Sebelumnya

1. Otonomi Daerah

Istilah otonomi secara etimologi berasal dari bahasa/kata latin yaitu "autos" yang berarti "sendiri", dan "nomos" yang berarti "aturan". Sehingga otonomi diartikan

“pengundangan sendiri”, mengatur atau memerintah sendiri. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut di atas dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan perundang-undangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah.

Otonomi daerah yang sudah berjalan lebih dari enam tahun di negara kita diharapkan bukan hanya pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah untuk menggeser kekuasaan. Hal itu ditegaskan oleh Kaloh (2002 : 7), bahwa otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah dan bukan otonomi “daerah” dalam pengertian wilayah/teritorial tertentu di tingkat lokal. Otonomi daerah bukan hanya merupakan pelimpahan wewenang tetapi juga peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Berbagai manfaat dan argumen yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah tidak langsung dapat dianggap bahwa otonomi adalah sistem yang terbaik. Berbagai kelemahan masih menyertai pelaksanaan otonomi yang harus diwaspadai dalam pelaksanaannya. Remy Prud’homme (Sugiyanto, 2000) mencatat beberapa kelemahan dan dilema dalam otonomi daerah, antara lain :

1. Menciptakan kesenjangan antara daerah kaya dengan daerah miskin
2. Mengancam stabilitas ekonomi akibat tidak effisiennya kebijakan ekonomi makro, seperti kebijakan fiskal.
3. Mengurangi efisiensi akibat kurang representatifnya lembaga perwakilan rakyat dengan indikator masih lemahnya *public hearing*.
4. Perluasan jaringan korupsi dari pusat menuju daerah.

2. Desentralisasi Fiskal

Asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.33 tahun 2004 dibagi menjadi tiga, yaitu : desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Konsekuensi dari pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah otonom, tidak lain adalah penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Menurut Kusaini (2006: 29) desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat.

Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip (*rules*) *money should follow function* merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan (Bahl, 2000: 19). Artinya, setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan derivatif dari kebijakan otonomi daerah, melalui pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah. Artinya, semakin banyak wewenang yang dilimpahkan, maka kecenderungan semakin besar biaya yang dibutuhkan oleh daerah.

Bahl (2000:25-26) mengemukakan dalam aturan yang keduabelas, bahwa desentralisasi harus memacu adanya persaingan di antara berbagai pemerintah lokal untuk menjadi pemenang (*there must be a champion for fiscal decentralization*). Hal ini dapat dilihat dari semakin baiknya pelayanan publik. Pemerintah lokal berlomba-lomba untuk memahami benar dan memberikan apa yang terbaik yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, perubahan struktur ekonomi masyarakat dengan peran masyarakat yang semakin besar meningkatkan kesejahteraan rakyat, partisipasi rakyat setempat dalam pemerintahan dan lain-lain.

Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal terkandung tiga misi utama, yaitu (Barzelay, 1991) :

- a. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas urgensi dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat dijelaskan dengan beberapa alasan sebagai berikut :

1. Sebagai perwujudan fungsi dan peran negara modern, yang lebih menekankan upaya memajukan kesejahteraan umum (*welfare state*).
2. Hadirnya otonomi daerah dapat pula didekati dari perspektif politik. Negara sebagai organisasi, kekuasaan yang didalamnya terdapat lingkungan kekuasaan baik pada tingkat suprastruktur maupun infrastruktur, cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Untuk menghindari hal itu, perlu pemencaran kekuasaan (*dispersed of power*).

3. Dari perspektif manajemen pemerintahan negara modern, adanya kewenangan yang diberikan kepada daerah, yaitu berupa keleluasaan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, merupakan perwujudan dari adanya tuntutan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan umum.

Desentralisasi fiskal, merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk *surcharge of taxes*, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman, maupun subsidi/bantuan dari pemerintah pusat.

Menurut Bahl (2001) desentralisasi fiskal harus diikuti oleh kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak (*taxing power*). Secara teori adanya kemampuan pajak, maka pemerintah daerah akan memiliki sumber dana pembangunan yang besar. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah ini secara teori dapat berdampak positif maupun negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak positif pajak (*local tax rate*) dapat dijelaskan dengan kenyataan bahwa *tax revenue* akan digunakan oleh pemerintah untuk membangun berbagai infrastruktur dan membiayai berbagai pengeluaran publik. Sebaliknya, dampak negatif pajak bagi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan karena pajak menimbulkan "*deadweight loss of tax*". Ketika pajak dikenakan pada barang, maka pajak akan mengurangi surplus konsumen dan produsen.

Menurut Oates (1993) desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah sub nasional/pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang

publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan lebih didengarkan untuk menganekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisiensi alokasi. Oates juga menyatakan bahwa desentralisasi fiskal meningkatkan efisiensi ekonomi yang kemudian berkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi. Perbelanjaan infrastruktur dan sektor sosial oleh pemerintah daerah lebih memacu pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya daerah memiliki kelebihan dalam membuat anggaran pembelanjaan sehingga lebih efisien dengan memuaskan kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaannya.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) menjelaskan atau mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dalam perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi secara fisik yang terjadi di suatu negara, seperti pertambahan jumlah dan produksi barang industri, pertambahan jumlah infrastruktur, sarana pendidikan, penambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada, dan berbagai perkembangan lainnya.

Menurut Kuznet dalam Todaro (2003:99) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas ditentukan oleh kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional, dan ideologis terhadap tuntutan keadaan yang ada. Kuznets dalam Pressman (2000:77) juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan perpaduan efek dari produktivitas yang tinggi dan populasi yang besar. Dari kedua faktor ini pertumbuhan produktivitas jelas lebih penting, karena seperti yang ditunjukkan oleh Adam Smith, pertumbuhan produktivitas inilah yang menghasilkan peningkatan dalam standar kehidupan. Kuznets sangat menekankan pada perubahan dan inovasi teknologi sebagai cara meningkatkan pertumbuhan produktivitas terkait dengan redistribusi tenaga kerja dari sektor yang kurang produktif (yaitu pertanian) ke sektor yang lebih produktif (yaitu industri manufaktur).

Todaro (2003: 92) menyampaikan ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara. Ketiga faktor tersebut adalah :

1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
2. Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
3. Kemajuan teknologi, berupa cara baru atau perbaikan cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan.

Menurut teori Klasik, akumulasi modal serta jumlah tenaga kerja memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Smith menyebut ada tiga unsur pokok dalam produksi suatu negara, yaitu :

- a. Sumber daya yang tersedia, yaitu tanah.
- b. Sumber daya insani, yaitu jumlah penduduk.
- c. Stok barang modal yang ada.

Menurut Schumpeter dalam Pressman (2000:155) pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi secara terus-menerus tetapi mengalami keadaan di mana adakalanya berkembang dan pada ketika lain mengalami kemunduran. Konjungtur tersebut disebabkan oleh kegiatan para pengusaha (*entrepreneur*) melakukan inovasi atau pembaruan dalam kegiatan mereka menghasilkan barang dan jasa. Untuk mewujudkan inovasi yang seperti ini investasi akan dilakukan, dan pertambahan investasi ini akan meningkatkan kegiatan ekonomi. Proses

multiplier yang ditimbulkannya akan menyebabkan peningkatan lebih lanjut dalam kegiatan ekonomi dan perekonomian mengalami pertumbuhan yang lebih pesat

Dalam teori basis ekonomi (*economic base theory*) disebutkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut, kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan non basis. Hanya kegiatan basis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah (Tarigan, 2005:28).

4. Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang berhubungan dengan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi untuk memperkuat pijakan dalam studi ini, adalah:

1. Jorge Martinez-Vasquez dan Robert M. McNab (2001).

Penelitian Martinez dan Robert M. McNab mengkaji tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Dijelaskan bahwa hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi belum tentu mempunyai dampak secara langsung. Desentralisasi akan mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila desentralisasi fiskal dipusatkan pada pengeluaran atau pembelanjaan publik.

2. Raksaka Mahi (2001).

Mahi meneliti tentang dampak desentralisasi dengan judul "*Fiscal decentralization : It's Impact on Cities Growth*". Menggunakan model ekonometrika simultan *two stage least squares model*. Variabel desentralisasi fiskal diukur dengan dana bagi hasil, DAU, dan DAK. Hasil penelitian disimpulkan bahwa, (1) dana alokasi umum lebih menjanjikan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan yang lainnya walaupun desain kebijakan dana alokasi umum tidak mendukung pemerataan ekonomi antar daerah. (2) Bagi hasil pajak dan bukan pajak menurunkan pertumbuhan ekonomi. (3) Kebutuhan bagi hasil sumber daya alam berpotensi mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesenjangan antar daerah.

3. Bambang PS Brodjonegoro dan Teguh Dartanto (2003).

Penelitian mereka mengestimasi dampak desentralisasi fiskal di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan antar daerah : analisa model makro ekonometrik simultan. Hasil analisis diperoleh bahwa, setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal kesenjangan antar wilayah semakin besar antar daerah di Indonesia. Dalam era desentralisasi fiskal dengan transfer dana dari pemerintah pusat dan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi yang ada memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, kajian teori, dan penelitian sebelumnya maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

E. Metode Penelitian

Tulisan ini (Pengaruh Desentralisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah) merupakan bagian dari penelitian dengan tema besar yang telah dilakukan oleh peneliti yang sama dengan judul "Pengaruh Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah, Penyerapan Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

1. Data dan Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan secara sensus dengan data sekunder berbentuk *time series* dari tahun 2001 sampai dengan 2005, dan data *cross section* yang terdiri atas 35 kabupaten/kota, sehingga merupakan *pooled the data* yaitu gabungan antara data *time series* (tahun 2001-2005: 5 tahun) dengan data *cross section* 35 kabupaten/kota. Kasus analisisnya memenuhi persyaratan dari model yang digunakan.

Pengumpulan data dilakukan melalui perpustakaan yang berupa referensi statistik, terbitan berkala, buku, dokumen, maupun koleksi khusus.

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional atas variabel penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Desentralisasi Fiskal (X1)

Dalam penelitian ini, desentralisasi fiskal diproksi dengan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan realisasi pengeluaran total pemerintah kabupaten/kota. Salah satu alasan penggunaan variabel desentralisasi fiskal ini mengacu pada Zang dan Zou (1998), studi empiris Mahi (2000) Tim LPEM-UI (Halim, 2001:28), dan studi empiris Mursinto (2004:170).

2. Pertumbuhan Ekonomi (Y1)

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan PDRB per tahun menurut harga berlaku, yang dinyatakan dalam satuan persen. Rumus pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan ekonomi}_{\text{per tahun}} = \frac{PDRB_t - PDRB_{(t-1)}}{PDRB_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan, $PDRB_t$ adalah PDRB tahun ke-t

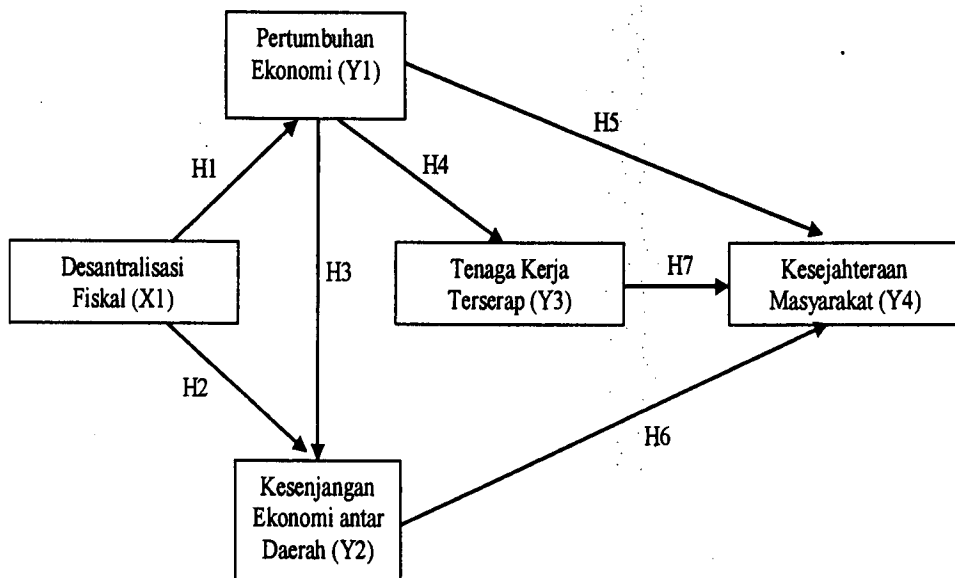
$PDRB_{(t-1)}$ adalah PDRB tahun ke (t-1)

Penggunaan data pertumbuhan ekonomi dalam harga berlaku dengan alasan bahwa data dalam desentralisasi fiskal yang meliputi : pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak, maupun realisasi total pengeluaran pemerintah daerah adalah dalam harga berlaku (Mursinto, 2004).

3. Analisis Data

Pengujian hipotesis menggunakan analisis jalur (*path analysis*), yang dikembangkan sebagai model untuk mempelajari pengaruh secara langsung maupun tidak langsung dari variabel eksogen terhadap variabel endogen.

Berdasarkan studi teoritik dan empirik sebelumnya, kerangka konseptual dalam tema yang besar yang lengkap digambarkan dalam suatu kerangka konsep sebagai berikut:



Bentuk hubungan sebab akibat yang muncul menggunakan model yang cukup kompleks, yaitu adanya variabel yang berperan ganda sebagai variabel independen pada suatu hubungan, tetapi menjadi variabel dependen pada hubungan yang lain. Bentuk hubungan seperti ini membutuhkan alat analisis yang mampu menjelaskan secara simultan, untuk itu digunakan analisis jalur (*path analysis*) (Wibowo, 2005:1).

Proses perhitungan koefisien dalam analisis jalur didekati melalui analisis regresi dengan variabel yang dibakukan (*standardise regression*). Komputasi dilakukan dengan *software SPSS for window*. Model persamaan dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y1 = \beta X1 + \mu1$$

Di mana : X1 adalah desentralisasi fiskal

Y1 adalah pertumbuhan ekonomi

μ adalah *disturbance term*

F. Hasil dan Pembahasan

Wilayah Provinsi Jawa Tengah mencakup areal seluas 32.548,20 km² atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa (1,70 persen dari luas Indonesia). Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah dengan topografi yang beragam, yakni berupa dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan dan daerah pantai. Sekitar 53,30 persen wilayah Provinsi Jawa Tengah berada pada ketinggian antara 0 hingga 100 meter di atas permukaan laut. Iklim di Jawa Tengah termasuk kering dan basah dengan curah hujan beragam, baik daerah kering maupun basah berkisar antara 800 hingga 8.890 milimeter setiap tahunnya. Secara administratif di Jawa Tengah ada 35 kabupaten/kota, terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota.

1. Kondisi Perekonomian Provinsi Jawa Tengah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah. Gambaran PDRB Jawa Tengah selama empat

tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1. Berdasarkan data Tabel 1, pada tahun 2005 PDRB Jawa Tengah sebesar Rp 143.051.214 juta, sektor yang paling besar menyumbang terhadap pembentukan PDRB adalah sektor industri pengolahan sebesar Rp 46.105.706 juta (32,23 persen). Sektor yang paling kecil kontribusinya terhadap PDRB adalah sektor listrik, gas dan air bersih yaitu menyumbang sebesar Rp 1.179.891 juta (0,82 persen).

Tabel 1

**PDRB PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 – 2005
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 (Juta Rupiah)**

Sektor	2002	%	2003	%	2004	%	2005	%
1. Pertanian	27.725.086	22,53	27.157.596	21,03	28.606.237	21,07	29.924.642	20,92
2. Pertamb. & Galian	1.227.652	1,00	1.295.356	1,00	1.330.759	0,98	1.454.230	1,02
3. Industri Peng.	39.193.653	31,85	41.347.172	32,01	43.995.611	32,40	46.105.706	32,23
4. Listrik, Gas, Air	975.869	0,79	980.307	0,76	1.065.115	0,78	1.179.891	0,82
5. Bangunan	6.116.818	4,97	6.907.251	5,35	7.448.715	5,49	7.960.948	5,57
6. Perdg. Hotel & Res	26.289.743	21,37	27.666.472	21,42	28.394.473	20,91	30.056.962	21,01
7. Pengkt. dan Komk.	5.872.916	4,77	6.219.923	4,82	6.510.447	4,79	6.988.425	4,89
8. Keuangan, Persew.	4.524.128	3,68	4.650.862	3,60	4.775.114	3,52	5.067.665	3,54
9. Jasa-jasa	11.112.678	9,03	12.941.525	10,02	13.663.399	10,06	14.312.739	10,01
Total PDRB	123.038.541	100	129.166.463	100	135.789.872	100	143.051.214	100
Pertumbuhan	3,55		4,98		5,13		5,35	

Sumber: BPS, PDRB Jawa Tengah, 2006

2. Pendapatan Asli daerah

Berdasarkan data PAD di kabupaten/kota di Jawa Tengah (Tabel 2), nilai absolutnya dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Pada dasarnya PAD di kabupaten/kota di Jawa Tengah masih relatif kecil sebagai sumber pembiayaan dibanding total pengeluaran daerah. Persentase PAD terhadap realisasi total pengeluaran daerah rata-rata masih di bawah 9 persen. Pada tahun 2005 PAD terbesar di Jawa Tengah adalah di Kota Semarang yaitu sebesar Rp163.621.100 ribu, diikuti oleh Kabupaten Cilacap sebesar Rp101.873.000 ribu. Adapun penerimaan PAD yang paling kecil tahun 2005 adalah Kota Pekalongan yaitu sebesar Rp12.838.810 ribu.

Tabel 2

**PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2001 - 2005 (Ribu Rupiah)**

Tabel 2
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2001 - 2005 (Ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	2001	2002	2003	2004	2005
Kab.Cilacap	32.112.950	46.833.922	45.494.812	53.499.090	101.873.000
Kab.Banyumas	29.541.431	37.499.527	45.045.840	51.224.310	47.901.860
Kab.Purbalingga	15.169.508	23.522.645	28.179.000	28.619.780	31.790.060
Kab.Banjarnegara	13.266.099	21.951.039	25.303.140	30.622.370	26.614.950
Kab.Kebumen	14.216.180	26.625.971	29.807.200	26.264.660	27.153.350
Kab.Purworejo	15.391.413	20.914.955	21.882.950	26.277.060	30.751.980
Kab.Wonosobo	10.824.602	26.507.231	24.159.626	23.869.510	20.665.320
Kab.Magelang	23.550.264	32.079.438	35.808.180	43.687.040	46.344.690
Kab.Boyolali	17.675.167	24.460.326	32.781.310	36.960.020	46.616.170
Kab.Klaten	13.897.566	17.519.438	21.879.726	27.047.600	33.466.710
Kab.Sukoharjo	13.296.684	18.555.318	19.929.270	21.701.840	25.245.340
Kab.Wonogiri	14.224.168	23.108.192	25.998.750	25.290.370	35.101.100
Kab.Karanganyar	16.550.714	17.300.155	25.196.920	29.485.260	29.851.980
Kab.Sragen	14.866.610	24.347.952	42.976.692	43.547.110	31.497.970
Kab.Grobogan	17.975.772	27.067.567	37.296.066	37.038.760	38.917.690
Kab.Blora	16.481.414	26.185.726	26.933.910	29.530.460	29.706.640
Kab.Rembang	9.441.588	15.677.504	18.295.450	18.715.700	19.926.750
Kab.Pati	30.193.137	34.573.274	40.826.750	55.030.350	46.418.260
Kab.Kudus	22.126.358	30.198.793	38.842.600	41.617.400	39.968.700
Kab. Jepara	20.235.162	45.036.658	53.740.240	47.266.550	53.704.230
Kab. Demak	11.117.809	14.597.124	18.320.152	17.449.370	22.108.420
Kab. Semarang	18.928.280	30.058.625	40.269.710	44.624.640	50.099.810
Kab. Temanggung	11.184.582	18.021.900	18.580.060	19.572.480	35.162.130
Kab. Kendal	21.889.307	35.783.037	37.174.070	31.671.370	44.638.580
Kab. Batang	13.947.641	21.382.844	23.308.570	23.610.800	19.189.730
Kab. Pekalongan	15.219.032	22.278.219	22.734.770	27.224.990	22.275.300
Kab. Pemalang	15.174.330	25.001.558	29.868.640	26.905.820	29.602.140
Kab. Tegal	18.599.227	32.581.299	38.336.280	39.009.420	46.219.890
Kab. Brebes	14.520.906	22.182.605	25.288.380	25.735.110	31.140.700
Kota. Magelang	12.311.353	19.191.415	23.567.460	22.628.700	24.486.980
Kota. Surakarta	35.640.532	44.922.141	54.815.679	59.632.520	62.852.840
Kota. Salatiga	10.501.149	17.703.834	20.181.960	21.619.400	24.146.320
Kota. Semarang	85.509.298	122.590.245	143.157.300	155.824.660	163.621.100
Kota. Pekalongan	13.392.028	16.247.596	13.679.480	15.864.600	12.838.810
Kota. Tegal	17.576.788	30.410.523	3.5147.570	4.2359.750	4.1719.370

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Daerah, 2001 sampai dengan 2005

3. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Dana bagi hasil yang di terima daerah otonom di Jawa Tengah rata-rata meningkat setiap tahunnya, daerah otonom yang paling besar menerima kucuran dana bagi hasil selama lima tahun terakhir adalah Kota Semarang (Rp 56.364.520 ribu tahun 2001, dan Rp 146.321.510 ribu tahun 2005). Daerah otonom yang paling sedikit menerima dana bagi hasil selama lima tahun terakhir adalah Kota Magelang.

Tabel 3

**DANABAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 – 2005 (Ribu Rupiah)**

Kabupaten/Kota	2001	2002	2003	2004	2005
Kab. Cilacap	21.036.220	31.702.930	29.680.510	39.892.600	24.510.160
Kab. Banyumas	16.487.150	23.374.370	23.842.260	30.214.260	17.296.320
Kab. Purbalingga	8.966.750	11.615.910	17.367.209	17.730.030	19.575.010
Kab. Banjarnegara	9.517.260	13.035.860	22.851.580	17.799.090	12.375.900
Kab. Kebumen	12.284.490	16.092.220	16.895.940	22.701.050	13.348.320
Kab. Purworejo	14.668.030	17.164.320	32.065.329	19.627.410	15.011.240
Kab. Wonosobo	11.163.190	14.599.200	12.024.361	19.876.720	12.436.310
Kab. Magelang	10.274.520	18.567.071	28.035.740	24.410.820	15.756.640
Kab. Boyolali	16.075.190	21.408.940	17.157.189	19.384.910	10.100.000
Kab. Klaten	10.494.720	12.714.080	19.991.496	25.146.160	21.093.660
Kab. Sukoharjo	11.230.440	14.027.400	21.527.920	25.226.150	20.180.230
Kab. Wonogiri	12.174.800	11.750.810	16.574.700	20.539.570	15.949.900
Kab. Karanganyar	17.345.570	21.546.000	16.525.840	21.608.770	14.955.530
Kab. Sragen	9.255.780	11.704.820	17.181.277	18.611.370	12.375.970
Kab. Grobogan	12.750.550	26.892.780	35.023.264	28.452.030	21.634.360
Kab. Blora	12.909.950	21.427.730	29.439.541	27.007.030	16.947.340
Kab. Rembang	12.510.160	15.028.760	17.493.150	17.234.660	13.341.500
Kab. Pati	21.684.900	22.787.713	21.453.230	22.757.040	16.954.920
Kab. Kudus	18.825.100	17.939.510	21.178.690	30.936.950	29.966.100
Kab. Jepara	10.827.900	18.508.040	21.335.540	23.275.220	17.426.270
Kab. Demak	11.551.120	16.050.660	29.661.771	20.490.250	16.312.920
Kab. Semarang	17.922.810	26.335.820	20.897.306	21.802.380	22.575.130
Kab. Temanggung	8.510.540	11.829.470	18.482.720	16.894.820	11.863.560
Kab. Kendal	17.721.730	24.536.360	20.067.190	23.008.600	19.580.000
Kab. Batang	8.765.320	12.258.810	16.321.180	17.812.060	15.713.350
Kab. Pekalongan	10.688.150	18.110.660	16.895.880	16.862.100	13.001.960
Kab. Pemasang	10.493.550	15.434.400	22.151.429	24.071.940	18.528.950
Kab. Tegal	17.606.340	21.831.180	18.476.160	50.117.280	17.500.860
Kab. Brebes	17.009.100	17.650.810	25.309.110	29.374.150	23.405.750
Kota. Magelang	6.170.020	13.657.890	10.982.210	12.708.370	9.013.700
Kota. Surakarta	17.214.000	17.695.220	23.271.992	34.818.460	33.509.090
Kota. Salatiga	10.551.220	13.383.120	11.573.550	12.539.860	10.084.680
Kota. Semarang	56.364.520	109.718.680	147.103.710	197.954.720	146.321.510
Kota. Pekalongan	8.222.790	16.386.030	15.235.840	15.592.430	10.712.360
Kota. Tegal	9.020.080	11.913.750	16.183.500	18.128.890	13.584.190

3. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Dana bagi hasil yang di terima daerah otonom di Jawa Tengah rata-rata meningkat setiap tahunnya, daerah otonom yang paling besar menerima kucuran dana bagi hasil selama lima tahun terakhir adalah Kota Semarang (Rp 56.364.520 ribu tahun 2001, dan Rp 146.321.510 ribu tahun 2005). Daerah otonom yang paling sedikit menerima dana bagi hasil selama lima tahun terakhir adalah Kota Magelang.

Tabel 3
DANA BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 – 2005 (Ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	2001	2002	2003	2004	2005
Kab. Cilacap	21.036.220	31.702.930	29.680.510	39.892.600	24.510.160
Kab. Banyumas	16.487.150	23.374.370	23.842.260	30.214.260	17.296.320
Kab. Purbalingga	8.966.750	11.615.910	17.367.209	17.730.030	19.575.010
Kab. Banjarnegara	9.517.260	13.035.860	22.851.580	17.799.090	12.375.900
Kab. Kebumen	12.284.490	16.092.220	16.895.940	22.701.050	13.348.320
Kab. Purworejo	14.668.030	17.164.320	32.065.329	19.627.410	15.011.240
Kab. Wonosobo	11.163.190	14.599.200	12.024.361	19.876.720	12.436.310
Kab. Magelang	10.274.520	18.567.071	28.035.740	24.410.820	15.756.640
Kab. Boyolali	16.075.190	21.408.940	17.157.189	19.384.910	10.100.000
Kab. Klaten	10.494.720	12.714.080	19.991.496	25.146.160	21.093.660
Kab. Sukoharjo	11.230.440	14.027.400	21.527.920	25.226.150	20.180.230
Kab. Wonogiri	12.174.800	11.750.810	16.574.700	20.539.570	15.949.900
Kab. Karanganyar	17.345.570	21.546.000	16.525.840	21.608.770	14.955.530
Kab. Sragen	9.255.780	11.704.820	17.181.277	18.611.370	12.375.970
Kab. Grobogan	12.750.550	26.892.780	35.023.264	28.452.030	21.634.360
Kab. Blora	12.909.950	21.427.730	29.439.541	27.007.030	16.947.340
Kab. Rembang	12.510.160	15.028.760	17.493.150	17.234.660	13.341.500
Kab. Pati	21.684.900	22.787.713	21.453.230	22.757.040	16.954.920
Kab. Kudus	18.825.100	17.939.510	21.178.690	30.936.950	29.966.100
Kab. Jepara	10.827.900	18.508.040	21.335.540	23.275.220	17.426.270
Kab. Demak	11.551.120	16.050.660	29.661.771	20.490.250	16.312.920
Kab. Semarang	17.922.810	26.335.820	20.897.306	21.802.380	22.575.130
Kab. Temanggung	8.510.540	11.829.470	18.482.720	16.894.820	11.863.560
Kab. Kendal	17.721.730	24.536.360	20.067.190	23.008.600	19.580.000
Kab. Batang	8.765.320	12.258.810	16.321.180	17.812.060	15.713.350
Kab. Pekalongan	10.688.150	18.110.660	16.895.880	16.862.100	13.001.960
Kab. Pemasang	10.493.550	15.434.400	22.151.429	24.071.940	18.528.950
Kab. Tegal	17.606.340	21.831.180	18.476.160	50.117.280	17.500.860
Kab. Brebes	17.009.100	17.650.810	25.309.110	29.374.150	23.405.750
Kota. Magelang	6.170.020	13.657.890	10.982.210	12.708.370	9.013.700
Kota. Surakarta	17.214.000	17.695.220	23.271.992	34.818.460	33.509.090
Kota. Salatiga	10.551.220	13.383.120	11.573.550	12.539.860	10.084.680
Kota. Semarang	56.364.520	109.718.680	147.103.710	197.954.720	146.321.510
Kota. Pekalongan	8.222.790	16.386.030	15.235.840	15.592.430	10.712.360
Kota. Tegal	9.020.080	11.913.750	16.183.500	18.128.890	13.584.190

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 - 2005

Dari data Tabel 5, menunjukkan bahwa realisasi total pengeluaran daerah terbesar dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah ditunjukkan oleh Kota Semarang (tahun

2001 sebesar Rp 584.512.404 ribu, tahun 2005 sebesar Rp 647.569.061 ribu). Besarnya pengeluaran daerah di Kota Semarang antara lain karena besarnya pengeluaran rutin untuk pegawai, sedangkan realisasi pengeluaran daerah terkecil ditunjukkan oleh Kota Salatiga (tahun 2001 sebesar Rp 89.074.033 ribu, tahun 2005 sebesar Rp 172.292.837 ribu) yang disebabkan oleh relatif kecilnya pengeluaran rutin.

5. Rasio Pendapatan Asli Daerah ditambah Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Terhadap Realisasi Total Pengeluaran

Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota memerlukan dana yang semakin besar sebagai dampak tuntutan masyarakat yang dinamis dan bergerak cepat, sementara di lain pihak dihadapkan pada sumber dana yang terbatas. Sekarang ini kemampuan keuangan pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat. Oleh karena itu peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi fiskal. Gambaran kemampuan pembiayaan terhadap realisasi total pengeluaran di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah terdapat pada Tabel 6.

Berdasarkan data pada Tabel 6, menunjukkan bahwa kemampuan pembiayaan terhadap realisasi pengeluaran di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah masih relatif rendah. Pada tahun 2001 kondisi yang paling baik di Kabupaten Cilacap (0,25), sedangkan yang paling kecil adalah Kabupaten Klaten (0,08). Pada tahun 2005 rasio PAD dengan bagi hasil terhadap realisasi total pengeluaran paling besar di Kota Semarang (0,48), sedangkan yang paling kecil di Kabupaten Sragen (0,06).

Tabel 6
RASIO PAD DITAMBAH BAGI HASIL TERHADAP
REALISASI TOTAL PENGELUARAN DI KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 – 2005

Tabel 6
RASIO PAD DITAMBAH BAGI HASIL TERHADAP
REALISASI TOTAL PENGELUARAN DI KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 – 2005

NO	Kabupaten/Kota	2001	2002	2003	2004	2005
1	Kab. Cilacap	0,25	0,20	0,14	0,19	0,23
2	Kab. Banyumas	0,20	0,16	0,15	0,17	0,13
3	Kab. Purbalingga	0,10	0,13	0,13	0,15	0,16
4	Kab. Banjarnegara	0,11	0,14	0,15	0,14	0,10
5	Kab. Kebumen	0,17	0,12	0,11	0,11	0,10
6	Kab. Purworejo	0,11	0,14	0,14	0,13	0,14
7	Kab. Wonosobo	0,10	0,17	0,07	0,12	0,10
8	Kab. Magelang	0,14	0,15	0,16	0,16	0,14
9	Kab. Boyolali	0,15	0,16	0,12	0,14	0,15
10	Kab. Klaten	0,08	0,08	0,09	0,11	0,11
11	Kab. Sukoharjo	0,15	0,16	0,12	0,13	0,15
12	Kab. Wonogiri	0,11	0,12	0,11	0,10	0,12
13	Kab. Karanganyar	0,15	0,15	0,12	0,14	0,13
14	Kab. Sragen	0,11	0,13	0,15	0,16	0,16
15	Kab. Grobogan	0,12	0,17	0,21	0,14	0,13
16	Kab. Blora	0,10	0,15	0,14	0,15	0,13
17	Kab. Rembang	0,13	0,15	0,13	0,13	0,14
18	Kab. Pati	0,20	0,18	0,15	0,18	0,14
19	Kab. Kudus	0,22	0,20	0,18	0,21	0,22
20	Kab. Jepara	0,12	0,22	0,20	0,18	0,18
21	Kab. Demak	0,08	0,14	0,15	0,11	0,14
22	Kab. Semarang	0,17	0,20	0,17	0,18	0,27
23	Kab. Temanggung	0,10	0,12	0,13	0,12	0,19
24	Kab. Kendal	0,13	0,17	0,14	0,14	0,19
25	Kab. Batang	0,10	0,15	0,13	0,13	0,13
26	Kab. Pekalongan	0,12	0,16	0,13	0,14	0,12
27	Kab. Pemalang	0,11	0,14	0,08	0,13	0,12
28	Kab. Tegal	0,12	0,18	0,13	0,20	0,14
29	Kab. Brebes	0,17	0,11	0,11	0,12	0,13
30	Kota. Magelang	0,16	0,23	0,19	0,20	0,20
31	Kota. Surakarta	0,21	0,24	0,22	0,29	0,30
32	Kota. Salatiga	0,24	0,28	0,29	0,20	0,20
33	Kota. Semarang	0,24	0,46	0,47	0,53	0,48
34	Kota. Pekalongan	0,24	0,24	0,27	0,17	0,13
35	Kota. Tegal	0,13	0,27	0,23	0,24	0,22

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Daerah, beberapa tahun, diolah

6. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan harga berlaku pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama 2001 - 2005 relatif berfluktuasi, pada tahun 2001 berkisar antara -9,12 – 30,25 persen, pada tahun 2005 pertumbuhannya berkisar antara 7,14 – 48,99 persen. Berfluktuasinya pertumbuhan ekonomi atas dasar harga berlaku ini lebih diakibatkan oleh faktor stabilitas harga atau laju inflasi pada setiap tahunnya. Data selengkapnya terlihat pada Tabel 7.

Tabel 7
PERTUMBUHAN EKONOMI ATAS DASAR HARGA BERLAKU DI KABUPATEN/
KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2001 – 2005 (Persen)

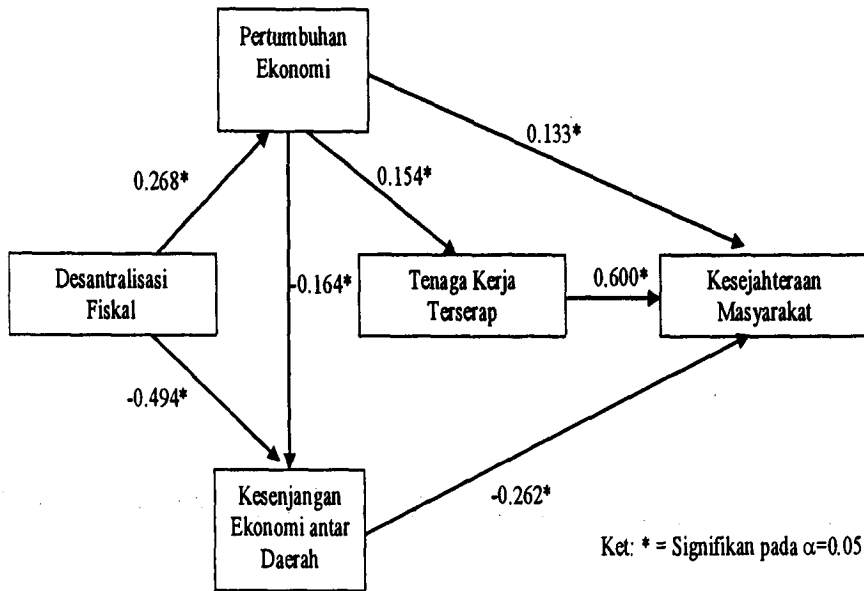
Kabupaten/Kota	2001	2002	2003	2004	2005
Kab. Cilacap	19,93	25,22	14,14	10,89	48,99
Kab. Banyumas	29,70	14,80	11,44	10,75	15,42
Kab. Purbalingga	27,94	11,19	11,96	11,60	13,59
Kab. Banjarnegara	-5,60	10,54	11,99	11,13	15,73
Kab. Kebumen	19,73	13,00	9,80	5,88	14,46
Kab. Purworejo	12,74	13,01	21,69	10,61	16,65
Kab. Wonosobo	14,83	10,74	9,57	8,78	11,94
Kab. Magelang	14,01	12,10	10,39	9,74	12,65
Kab. Boyolali	20,87	12,14	8,79	2,67	9,16
Kab. Klaten	22,31	14,77	11,61	11,40	19,08
Kab. Sukoharjo	30,00	9,56	9,16	9,77	15,38
Kab. Wonogiri	4,38	10,44	11,34	10,00	10,70
Kab. Karanganyar	11,42	10,16	11,67	13,74	11,37
Kab. Sragen	10,86	11,92	12,68	13,32	14,30
Kab. Grobogan	24,24	13,34	8,19	9,83	12,35
Kab. Blora	-9,12	12,69	10,29	11,60	12,55
Kab. Rembang	8,64	22,41	8,21	9,19	13,97
Kab. Pati	24,19	10,14	8,75	10,71	13,15
Kab. Kudus	31,71	26,23	13,93	15,22	19,92
Kab. Jepara	16,56	12,45	12,46	6,65	14,47
Kab. Demak	4,43	11,93	8,40	9,28	7,14
Kab. Semarang	29,55	14,35	8,54	6,54	14,17
Kab. Temanggung	6,26	10,98	10,08	9,97	10,82
Kab. Kendal	16,22	11,98	8,66	6,99	9,59
Kab. Batang	15,93	12,76	8,14	8,09	16,89
Kab. Pekalongan	15,36	11,73	11,81	6,01	18,70
Kab. Pemalang	10,76	12,45	11,35	10,49	20,89
Kab. Tegal	11,83	11,16	14,97	7,66	12,71
Kab. Brebes	24,90	15,64	10,28	11,32	21,98
Kota Magelang	12,84	13,87	11,19	9,20	14,09
Kota Surakarta	12,79	11,86	12,70	11,87	17,43
Kota Salatiga	16,14	13,81	9,94	7,65	28,57
Kota Semarang	12,04	11,22	9,74	11,15	15,16
Kota Pekalongan	21,05	9,67	8,14	7,93	16,62
Kota Tegal	30,25	15,99	9,81	11,53	13,38

Sumber: BPS, Jawa Tengah Dalam Angka beberapa tahun, (diolah)

7. Analisis Jalur dan Pembahasan

Hasil penelitian secara lengkap (lihat lampiran 2) didapatkan bahwa _iscal_e endogen (Pertumbuhan Ekonomi) dapat dijelaskan secara signifikan oleh _iscal_e eksogen (Desentralisasi Fiskal). Koefisien jalur merupakan hipotesis dalam penelitian ini, yang dapat disajikan dalam persamaan berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan asumsi, maka dari keempat model tersebut di atas dapat dinyatakan dalam grafik analisis jalur dengan bentuk seperti pada Gambar 1 berikut:



Beberapa prasyarat yang harus dipenuhi dalam analisis jalur adalah terpenuhi asumsi pada residual pada masing-masing model. Sehingga pada penelitian ini dilakukan pemeriksaan asumsi residual pada masing-masing model. Dari berbagai uji (uji normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, multikolinearitas) model menunjukkan lolos uji, sehingga model yang dipakai menunjukkan baik.

Berdasarkan hasil estimasi, interpretasi dari koefisien jalur adalah sebagai berikut: desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif sebesar 0,268 dengan nilai C.R. sebesar 3,662 dan diperoleh probabilitas signifikansi (p) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi (α) yang ditentukan sebesar 0,05. Dengan demikian desentralisasi fiskal berpengaruh secara langsung pada pertumbuhan ekonomi sebesar 0,268, yang berarti bahwa setiap ada kenaikan desentralisasi fiskal satu satuan maka akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,286 persen. Hasil estimasi ini memberikan dukungan atas hipotesis satu pada penelitian ini, bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Hasil studi ini mendukung temuan empiris Martinez and Robert M. Mc.Nab (2001), Mahi (2001), Brodjonegoro (2002), Dartanto dan Brodjonegoro (2003). Desentralisasi mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila desentralisasi fiskal dipusatkan pada pengeluaran/pembelanjaan publik. Desentralisasi fiskal yang diukur dengan pengeluaran pemerintah daerah menyebabkan pertumbuhan

1. Dalam era desentralisasi fiskal di mana daerah dituntut untuk bisa melakukan fungsinya secara efektif dan efisien, maka harus didukung dengan sumber-sumber keuangan yang memadai. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskalnya, melalui : pengembangan aktivitas ekonomi berbasis komoditi unggulan daerah, dan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
2. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkecil kesenjangan antar daerah serta meningkatkan kesejahteraan, dapat dilakukan dengan melakukan revitalisasi pertanian dari hulu sampai hilir untuk membantu daerah kabupaten/kota yang berbasis sektor primer (pertanian). Apabila program ini bisa efektif berjalan, secara tidak langsung *growth pole-growth pole* menyebar ke desa-desa, sehingga mampu menumbuhkan ekonomi desa dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Daftar Pustaka

- Bahl, Roy W. and Sally Wallace, 2001, *Fiscal Decentralization: The Provincial-Local Dimension. Fiscal Policy training Program 2001. Fiscal Decentralization Course. July 23-Agust, 2001. Atlanta-Georgia. World Bank Institute and Georgia State University, Andrew Young School of Policy Studies.*
- Bahl, Roy W., 2000. *China : Evaluating the impact of Intergovernmental Fiscal reform dalam Fiscal Decentralization in Developing Countries.* Edited by Richard M. Bird and Francois Vaillancourt, United Kingdom : Cambridge University Press.
- _____, 2002, "Implementation Rules For Fiscal Decentralization", *Working Paper*, Georgia State University.
- Badan Pusat Statistik, 2004. *Pendapatan Regional Jawa Tengah Tahun 2004.* Semarang : BPS dan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.
- _____, 2005a. *Jawa Tengah Dalam Angka.* Semarang : BPS dan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.
- _____, 2005b. *Statistik Keuangan Provinsi Jawa Tengah 2005.* Semarang : BPS Provinsi Jawa Tengah.
- _____, 2006a. *Jawa Tengah Dalam Angka 2006.* Semarang : BPS Provinsi Jawa Tengah.
- _____, 2006b. *Produk Domestik Regional Jawa Tengah 2006.* Semarang : BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Barzelay, M. 1991. "Managing Local Development, Lesson from Spain". *Policy Sciences*, 24, 271 – 290.
- Bird, Richard M., 1990. "Intergovernmental Finance and Local Taxation in Developing Countries Some Basic Consideration for Reformers". *Public Administration and Development.*

- Bird, Richard M., and Francois Vaillancourt, 2000. *Fiscal Decentralization in Developing Countries*, United Kingdom : Cambridge University Press.
- Gorodnichenko, Y, 2001. "Effects of Intergovernmental Aid on Fiscal Behavior of Local Governments : The Case of Ukraine". *Master Thesis*, University of Kiev. Available: <http://www.eerc.kiev.ua/research/matheses/2001/pdf/gorodnichenko.pdf>.
- Halim, Abdul, 2001, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMPYKPN.
- Kaho, Riwu Josef, 1997. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Kaloh, J, 2002. *Mencari bentuk Otonomi Daerah*, Jakarta : PT Rineka Cipta
- Khusaini, Muhamad, 2006, *Ekonomi Publik : Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, Malang : BPFE Unbraw.
- Kuncoro, Haryo, 2000. "Ekspansi Pengeluaran Pemerintah dan Responsitivitas Sektor Swasta". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 5 No. 1 Hal.:53-59, Surakarta : Penerbit FE-UMS.
- Kuncoro, Mudrajad, 2003. *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Mahi, Raksaka, 2001. Prospek Desentralisasi di Indonesia Ditinjau dari Segi Pemerataan Antar daerah dan Peningkatan Efisiensi. *Analisa CSIS XXIX*, Hal. 54-66, Jakarta : Indonesia Project, Jakarta.
- Mangkoesebroto, Guritno, 1997. *Ekonomi Publik* Edisi Ke-5. Yogyakarta : BPFE-UGM.
- Martinez-Vasquez, Jorge and Robert M. McNab.2001. "Fiscal Decentralization and Economic Growth". *International Studies Program Working Paper*. Atlanta : Andre Young School of Policy Studies, Georgia State University.
- Mursinto, Djoko, 2004, *Derajat Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Pada Era Otonomi Daerah Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur*, *Disertasi*, tidak dipublikasikan. Surabaya : Pascasarjana Unair.
- Musgrave, Richard A., and Peggy B. Musgrave. 1989. *Public Finance : In Theory and Practice*. Mc-Graw Hill. Tokyo : Kogakhusa Ltd.
- Oates, W, 1993, Fiscal Decentralization and Economic Development, *National Tax Journal*, XLVI. 237-243.
- Pressman, Steven, 2000, *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia*, Terjemahan Edisi Pertama, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Prud'homme, Remy, (1995). "On the Danger of Decentralization", Washington D.C., The World Bank, *Policy Research Working Paper*, 1252.
- Spechler, Martin C., 1990, *Perspectives in Economic Thought*, Singapore: McGraw-Hill Publishing Company.
- Sugiyanto, 2000. "Kemandirian dan Otonomi Daerah". *Media Ekonomi dan Bisnis*, Vol. XII, No.1 Hal.: 1-7, Semarang : FE UNDIP.
- Sukirno, Sadono, 2000, *Makro Ekonomi Modern:Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru* . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Teguh Dartanto dan Bambang PS Brodjonegoro, 2003. "Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Daerah : Analisa Model Makro Ekonometrik Simultan", *Indonesian journal of Economics and Development*, Vol.4 No.1 Juli 2003. Hal. 17-37. Jakarta : FE UI

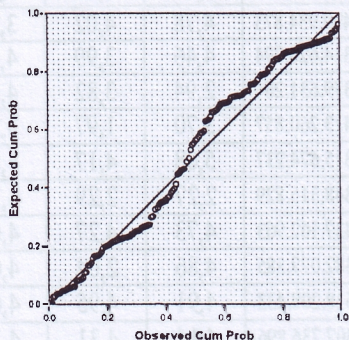
- Todaro, Michael P. and Smith Stephen C., 2003, *Economic Development*, Eighth Edition, United Kingdom : Pearson Education Limited.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Undang--Undang Nomor 13 tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*
- Wibowo, Arif, 2005. *Pengantar Analisis Jalur*, Surabaya : LPPM Unair Surabaya.
- World Bank, 1990. *World Development Report 1990: Poverty*, Oxford University Press, Oxford.

**REALISASI TOTAL PENGELUARAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT
KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002 – 2004**

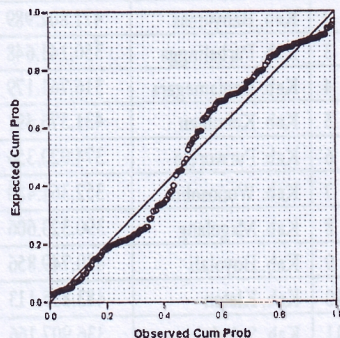
NO	Kabupaten/Kota	Realisasi Total Pengeluaran Daerah (Ribu Rupiah)			Pertumbuhan Ekonomi (Persen)		
		2003	2004	2005	2003	2004	2005
		545.722.029	502.955.108	551.365.880	6,56	6,88	7,99
2	Kab. Banyumas	471.802.989	488.851.690	499.934.873	4,78	4,02	3,21
3	Kab. Purbalingga	350.141.648	317.284.174	314.628.794	4,46	3,99	4,18
4	Kab. Banjarnegara	316.761.179	344.791.092	379.631.264	2,94	3,82	4,32
5	Kab. Kebumen	431.376.491	427.806.043	413.260.857	3,70	1,97	3,21
6	Kab. Purworejo	374.020.356	350.842.402	315.674.237	5,08	4,17	4,85
7	Kab. Wonosobo	352.361.480	351.619.864	348.315.829	2,27	2,29	3,19
8	Kab. Magelang	390.323.606	417.376.796	437.162.963	4,73	4,27	4,62
9	Kab. Boyolali	430.749.856	395.692.550	382.077.385	4,86	2,04	4,08
10	Kab. Klaten	483.855.113	495.124.460	518.208.433	4,91	4,95	4,66
11	Kab. Sukoharjo	336.907.166	347.962.300	307.736.896	4,14	4,31	4,11
12	Kab. Wonogiri	403.593.369	444.084.458	441.082.709	1,69	3,31	4,14
13	Kab. Karanganyar	348.659.940	363.553.294	348.879.655	5,67	6,79	5,49
14	Kab. Sragen	390.467.388	380.335.917	766.104.055	3,62	4,60	5,16
15	Kab. Grobogan	344.865.887	467.797.969	451.992.263	4,50	3,56	4,74
16	Kab. Blora	403.970.983	378.582.855	370.596.273	4,84	4,45	4,32
17	Kab. Rembang	265.460.001	286.605.170	243.010.132	3,12	3,88	3,15
18	Kab. Pati	419.773.703	444.319.716	453.304.272	2,13	4,13	4,01
19	Kab. Kudus	330.808.670	347.334.972	317.650.820	1,68	3,24	4,23
20	Kab. Jepara	370.344.031	385.401.281	401.140.564	3,85	3,78	4,23
21	Kab. Demak	327.643.101	332.211.468	265.382.642	2,85	3,40	3,86
22	Kab. Semarang	357.769.620	363.569.879	271.415.555	-2,96	1,13	3,18
23	Kab. Temanggung	294.674.039	308.187.439	244.119.337	4,52	3,69	3,99
24	Kab. Kendal	407.490.038	396.744.547	334.613.770	2,91	2,80	2,69
25	Kab. Batang	296.802.726	325.180.836	262.310.100	2,14	2,00	2,80
26	Kab. Pekalongan	304.568.857	311.462.405	297.233.825	3,69	4,10	3,72
27	Kab. Pemalang	408.865.006	405.560.095	388.688.853	3,81	3,94	4,15
28	Kab. Tegal	422.813.958	444.552.825	447.326.933	5,56	5,31	4,90
29	Kab. Brebes	458.169.979	447.994.376	434.585.246	4,77	4,81	4,83
30	Kota Magelang	178.912.851	175.418.967	164.960.090	3,74	3,00	5,71
31	Kota Surakarta	351.968.337	327.393.370	318.941.418	6,11	5,80	5,15
32	Kota Salatiga	110.040.019	168.950.588	172.292.837	5,19	3,13	4,23
33	Kota Semarang	621.669.886	661.416.254	647.569.061	4,91	4,37	5,50
34	Kota Pekalongan	107.177.581	180.288.472	179.445.904	3,78	4,80	3,82
35	Kota Tegal	218.966.946	252.064.887	250.636.872	5,20	6,25	4,87

Uji Normalitas

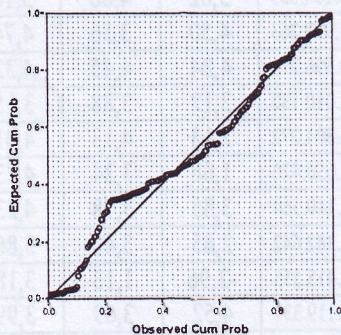
Normal P-P Plot of Standardized Residual



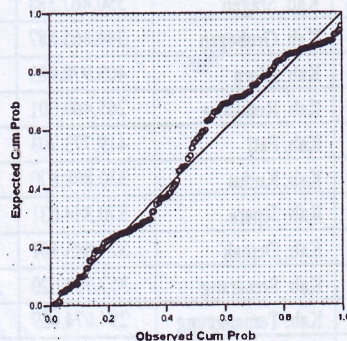
Normal P-P Plot of Standardized Residual

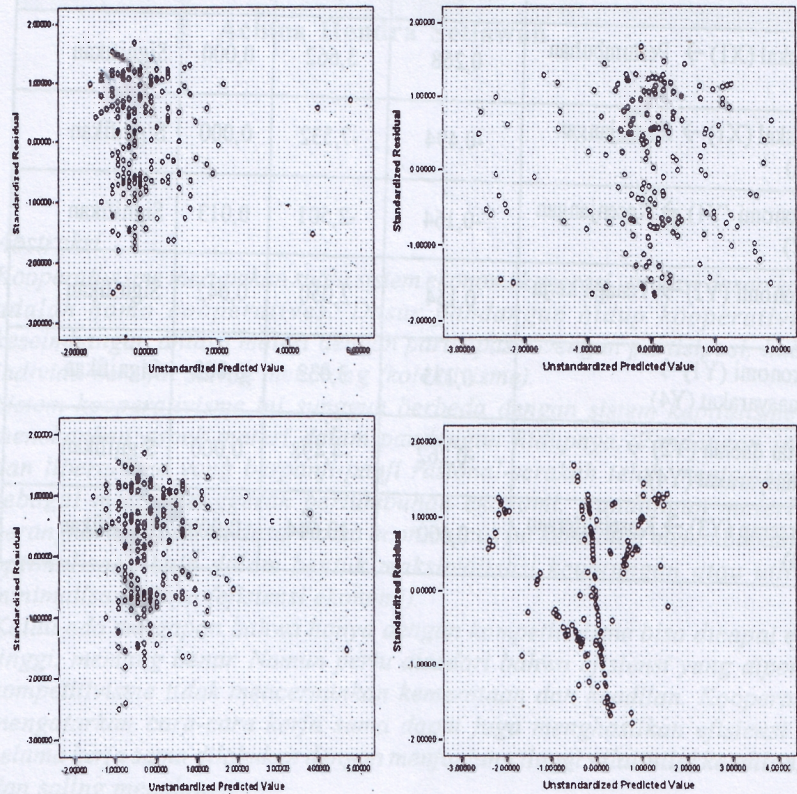


Normal P-P Plot of Standardized Residual



Normal P-P Plot of Standardized Residual





Kata Kunci: *kooperativisme, homo cooperatives, homo economicus, kompetitivitas*

Pendahuluan

Kooperativisme merupakan salah satu sistem ekonomi koperasi. Asumsi dasar kooperativisme adalah *homo cooperatives* yang di dalamnya terkandung nilai-nilai dasar koperasi seperti keadilan, persamaan, dan saling menolong. Sebagai unsur terpenting dalam kooperativisme adalah kerja sama yang dilakukan bersama untuk memperbaiki taraf kehidupan ekonomi dan sosial.

Dasar pandangan hidup kooperativisme adalah kesucingungan antara materi dengan partisipasi. Dengan partisipasi, hubungan antar individu bersifat saling menolong (*kollektivisme*). Dalam koperasi, hal ini tercermin dalam pembagian SHU koperasi kepada anggota. Semakin besar partisipasi anggota dalam koperasinya, maka semakin besar pula bagian dari hasil usaha (materi) yang akan diterima. Keterkaitan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai keadilan.

HASIL PENGUJIAN KOEFISIEN JALUR

Variabel	Koefisien	C.R.	Prob.	Keterangan
Desentralisasi Fiskal (X1) → Pertumbuhan ekonomi (Y1)	0,268	3,662	0,000	Signifikan
Desentralisasi Fiskal (X1) → Kesenjangan antar daerah (Y2)	-0,494	-7,532	0,000	Signifikan
Pertumbuhan ekonomi (Y1) → Kesenjangan antar daerah (Y2)	-0,164	-2,501	0,013	Signifikan
Pertumbuhan ekonomi (Y1) → Tenaga kerja terserap (Y3)	0,154	2,050	0,042	Signifikan
Pertumbuhan ekonomi (Y1) → Kesejahteraan masyarakat (Y4)	0,133	3,032	0,003	Signifikan
Kesenjangan antar daerah (Y2) → Kesejahteraan masyarakat (Y4)	-0,262	-4,498	0,000	Signifikan
Tenaga kerja terserap (Y3) → Kesejahteraan masyarakat (Y4)	0,600	10,644	0,000	Signifikan